

# Peta Kekuatan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Antara Kepala Desa dan BPD

**PUTRO, HARI S**

**Pembimbing : Dr.BUDI PRASETYO, Drs, M.Si**

LEGISLATIVE ; INTERACTION; DEMOCRACY

KKB KK-2 TP 07/11 Put p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

## SUMMARY

Interaksi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam sistem pemerintahan desa, dimana pemerintah desa diibaratkan adalah lembaga eksekutif serta BPD diibaratkan lembaga legislatif di desa adalah merupakan mitra kerja yang bersinergi untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran secara optimal menjadi sangat penting bagi pertumbuhan dan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel. Kondisi itu terjadi apabila hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan BPD terealisasi, namun apabila hubungan kedua lembaga tersebut terjadi permasalahan dan terjadi konflik maka akan berpengaruh juga terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Peta Kekuatan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Antara Kepala Desa dan BPD“ ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, apabila kedua lembaga desa tersebut terjadi konflik, dimana masing-masing lembaga mempergunakan kewenangannya untuk menekan satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data dianalisa secara kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa BPD Tanjung belum mampu secara optimal menjalankan fungsi pengawasannya secara organisasi karena komposisi kepengurusannya, serta karena tidak adanya sanksi bagi eksekutif apabila legislatif tidak menyetujui usul eksekutif. Sedangkan belum optimalnya fungsi anggaran karena ada atau tidak adanya persetujuan legislatif maka eksekutif dapat menggunakan APBDes tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah : *pertama*, faktor komposisi kepengurusan BPD dimana kepentingan eksekutif masih ada sehingga secara organisatoris BPD tidak dapat menunjukkan perannya dan hanya bersifat individual; *kedua*, tidak adanya sanksi bagi eksekutif dari pemerintah daerah apabila eksekutif tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama legislatif. Oleh karena itu maka disarankan agar : *pertama*, Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lamongan dapatnya memberikan sanksi dalam bentuk sanksi administratif apabila eksekutif ditingkat desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes yang merupakan kesepakatan yang telah dibuat bersama BPD; *kedua*, menanamkan budaya organisasi dengan lebih mengaktifkan tindakan-tindakan BPD secara kelembagaan, sistematis dan terorganisir.

Kata kunci : pemerintahan desa, eksekutif, legislatif, demokrasi, interaksi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

## ABSTRACT

Interaction between the Village Government and Village Government Agency are inseparately and it has connected in village government system. Village government is considered as executive institution while village government agency considered as legislature in the village. They are synergy partner of bussiness to accelerate the vilagge administration implementation. The existence of village government agency is able to implement function of oversight and function of budget optimally are become very important for growth and democracy realization within village government accountable. This condition can realized when there is a harmonious relationship among them. That is why research titled “Peta Kekuatan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Antara Kepala Desa dan BPD’ is aimed to extract and to figure out the effect of village government implementation, if there is conflict between those village institution which each institution use their authority to depress each other. This research method is qualitative method with descriptive explorative method approach. Data is analyzed qualitatively while is collected by interview, observation and documentation. The result of research showed that Tanjung Village Government Agency is optimally unable to implement function of control. It’s because of the staff composition and there is not sanction for executive institution if legislative does not approve executive’s proposal in village. While not optimal function of the budget because the presence or absence of legislative approval, the executive can use APBDes previous year. The factors that cause is not optimal implementation of these functions are: first, the factor composition of the executive management of Village Government Agency in which the interest is still there so that the organizational Village Government Agency can not point to his role and only the individual, secondly, the absence of sanctions for executives of local governments if executives are not implementing the agreements already made with the legislative. Therefore it is recommended: first, Local Government in Lamongan Regency failure by providing sanctions in the form of administrative sanction if the executive village level can not account for the implementation of APBDes which is an agreement that has been made with Village Government Agency; second, inculcating culture of the organization with more to enable the actions Village Government Agency in institutional, systematic and organized.

Keywords: village of governance, executive, legislative, interaction, democracy, oversight functions and budgetary functions.